



RENCANA KERJA TAHUN 2023





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut Lt. 9)
Website bkd.sumutprov.go.id - Email bkd@sumutprov.go.id
M E D A N

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/ 539 /2022

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210).
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 17);

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas perubahan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS Pemprovsu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- Kedua : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang agar menjadikan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- Ketiga : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 JUM 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Provsu;
2. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, situasi dan kondisi terkini, serta isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BKD Provsu tahun 2023 ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provsu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan untuk tahun 2023.

Untuk selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi para *stakeholder* terkait dengan Rencana Kerja, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023.

Medan, 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740202 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provsu Tahun 2021.....	8
2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
3.1.1. Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ...	17
3.1.2. Manajemen Talenta Pegawai (<i>Talent Pool</i>)	18
3.1.3. Penerapan Sistem Merit	19
2.4. Review Terhadap RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.	22
3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara.....	23
3.1.3. Telaahan Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara	26
3.1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	28
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	29
3.3. Telaahan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	29
3.4. Telaahan terkait Responsif Gender	31
3.5. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	32
3.5.1. Tujuan.....	32
3.6. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVSU.....	39
BAB V PENUTUP	40

LAMPIRAN

- T-C. 29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
BKD PROVSU
- T-C. 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- T-C. 31 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023 PROVINSI
SUMATERA UTARA
- T-C. 32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
- T-C. 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN
MAJU TAHUN 2023 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVSU

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD agar menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan mempedomani Renstra OPD serta mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Provsu serta mendukung pencapaian Misi ke-2 Gubernur Sumatera Utara yaitu : “Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik dengan Adanya Pemerintah yang dicintai, **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, Adil, Terpercaya, Politik yang Beretika, Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, dan Memiliki Kohesi Sosial yang Kuat Serta Harmonis”.

Dengan disusunnya Renja BKD Provsu tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* serta dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provsu tentang arah pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provsu pada tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Untuk memberi arah dan kebijakan tentang tahapan-tahapan penyusunan program dan kegiatan selama tahun 2023;
2. Tersedianya instrumen awal untuk bahan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka penilaian kinerja BKD Provsu.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai acuan BKD Provsu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat Evaluasi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Penentuan Isu-isu Strategis, Telaahan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Telaahan terkait Responsif Gender, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2022, dan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVSU

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provsu Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021, BKD Provsu telah didukung oleh 2 Program, 10 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sehubungan dengan berakhirnya tahun Anggaran 2021 BKD Provsu telah memaparkan sejauhmana tingkat keberhasilan dan realisasi kinerja BKD Provsu selama tahun 2021 yang dilihat dari tingkat capaian kinerja program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan dan secara resmi telah disampaikan laporannya kepada Gubernur Cq. Bappeda Provsu. Sedangkan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan capaian kinerja BKD Provsu pada tahun 2021, BKD Provsu telah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Biro Organisasi Setdaprovsu.

2.1.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 BKD Provsu telah melaksanakan Program dan kegiatan yang disertai dengan target serta pagu anggaran. Berikut ini dapat dilihat pada realisasi capaian program BKD pada tabel di bawah ini:

No	PRORGAM	TARGET	REALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2	Program Kepegawaian Daerah	100%	98,96%

Adapun realisasi capaian kinerja BKD Provsu tahun 2021 berdasarkan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKD Provsu Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100 %	100
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	5 Dok	100
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Bln	13 Bln	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Bln	13 Bln	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bln	12 Bln	100
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	100
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	12 Bln	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	12 Bln	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	12 Bln	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	12 Bln	100
D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	12 Bln	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	12 Bln	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	100
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	26 Unit	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bln	12 Bln	100
II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100 %	98,96 %	98,96
A.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	100,53 %	100,53
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	49 OPD	49 OPD	100
2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 X	1 X	100
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.131 SK	1.167 SK	103,18
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12 Bln	12 Bln	100
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	49 OPD	49 OPD	100
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100
B	Mutasi dan Promosi	100 %	100 %	100
1	Pengelolaan Mutasi ASN	900 SK	609 SK	67,67
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	16.000 SK	16.649 SK	104,06
3	Pengelolaan Promosi ASN	715 SK	715 SK	100
C	Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	104,91 %	104,91
1	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	450 ASN	545 ASN	121,11
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	650 ASN	644 ASN	99,08
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	3 Keg	3 Keg	100
4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1.950 SK	1.939 SK	99,44
D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	85,37 %	85,37
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.000 PNS	25.000 PNS	100
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1.850 ASN	873 ASN	47,19
3	Pembinaan Disiplin ASN	35 PNS	33 ASN	94,29
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Dok	1 Dok	100
JUMLAH		48.978	48.471	98,96

Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

No	Kegiatan	Target	Ralisasi	Ket
1	Pengelolaan Mutasi ASN	900 SK	609 SK	Usul mutasi ASN yang masuk hanya sebanyak 606 usul
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	1.850 ASN	873 ASN	Piagam Penghargaan Satyalencana Karya Satya yang terbit dari Presiden hanya sebanyak 873 Piagam.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya realisasi target beberapa kegiatan BKD Provsu pada tahun 2021 adalah adanya *refocusing* anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Untuk Kegiatan Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yakni Piagam Penghargaan Satyalencana Karya Satya yang terbit dari Presiden, pada tahun 2021 ditargetkan 1.850 ASN, namun masih 873 ASN yang diterbitkan, dan sebagian lagi diterbitkan di awal tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Organisasi Setdaprovsu, yaitu :

Revisi Perjanjian Kinerja BKD Provsu Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	85%
		2. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	95%

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Untuk mengukur capaian kinerja BKD Provsu pada Indikator di atas, BKD Provsu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka BKD Provsu berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara berkala melalui penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat yaitu para PNS yang berurusan administrasi kepegawaian dengan BKD dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan unsur-unsur pelayanan dan tugas pokok dan fungsi BKD Provsu.

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan realisasi target kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja oleh Kepala BKD Provsu dengan Gubernur Sumatera Utara. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan tahapan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Survey

Data Survey yang dikumpulkan didapatkan dari setiap pengunjung yang berurusan kepegawaian pada BKD Provsu dengan memberikan lembar kuesioner kepada PNS tersebut yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017. Adapun isi pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut

SURVEY INDEKS PELAYANAN / KEPUASAN KONSUMEN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	
Nama	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Instansi	:
Pelayanan / Bidang Yang Dituju	:
1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	: <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Sesuai
2. Kemudahan prosedur di BKD	: <input type="checkbox"/> Tidak Mudah <input type="checkbox"/> Mudah <input type="checkbox"/> Kurang Mudah <input type="checkbox"/> Sangat Mudah
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	: <input type="checkbox"/> Tidak Cepat <input type="checkbox"/> Cepat <input type="checkbox"/> Kurang Cepat <input type="checkbox"/> Sangat Cepat
4. Kewajiban biaya / tarif dalam pelayanan	: <input type="checkbox"/> Sangat Mahal <input type="checkbox"/> Murah <input type="checkbox"/> Cukup Mahal <input type="checkbox"/> Gratis
5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	: <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Kurang Sesuai <input type="checkbox"/> Sangat Sesuai
6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	: <input type="checkbox"/> Tidak Kompeten <input type="checkbox"/> Kompeten <input type="checkbox"/> Kurang Kompeten <input type="checkbox"/> Sangat Kompeten
7. Perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan	: <input type="checkbox"/> Tidak Sopan dan Ramah <input type="checkbox"/> Sopan dan Ramah <input type="checkbox"/> Kurang Sopan dan Ramah <input type="checkbox"/> Sangat Sopan dan Ramah
8. Kualitas Sarana dan Prasarana	: <input type="checkbox"/> Buruk <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Sangat Baik
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan	: <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Berfungsi kurang maksimal <input type="checkbox"/> Ada tapi tidak berfungsi <input type="checkbox"/> Dikelola dengan baik
Kritik dan Saran :	

Untuk setiap pertanyaan selanjutnya disingkat dengan U1-U9 (U1 untuk pertanyaan 1 dst). Adapun rekapitulasi data responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Keterangan	LK	PR	Pendidikan							Jlh
				SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Data Responden	149	102	9	0	1	3	228	10	0	251

b. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja survey kepuasan pelanggan dilakukan dengan pengolahan data survey pada aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu selaku OPD yang menangani penerapan Permenpan & RB No. 14 Tahun 2017, dimana setiap kuesioner yang dikumpulkan selanjutnya diinput pada aplikasi SINIKEMAS (202.159.112.72/skm) sehingga tidak perlu dilakukan pengolahan secara manual.

Dari hasil pengolahan data survey pada tahun 2021, didapat nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian adalah sebesar 83,85 dengan persentase capaian adalah sebesar 98,65% kategori “sangat baik” dari target yang ditetapkan 85%.

2. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Pada Indikator Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian, BKD Provsu telah menyusun beberapa kegiatan dan layanan kepegawaian yang relevan dengan IKU yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja dari target pada Indikator ini. Adapun kegiatan dan layanan kepegawaian dimaksud terlampir pada Tabel 2.1 diatas.

Dari uraian capaian kinerja program, kegiatan dan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah dijabarkan pada sub bab 2.1 dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Administrasi

Kepegawaian” adalah 95%, dengan capaian kinerja sebesar 98,96% sehingga persentase capaian adalah 104,16% kategori sangat baik.

Dari penjumlahan persentase capaian kinerja kedua Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu (1) Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian dan (2) Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian maka didapati Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebesar 101,40 % dengan kategori "sangat baik".

Untuk melihat lebih jelas capaian indikator kinerja BKD Provsu dapat dilihat pada lampiran Renja yang telah dituangkan pada Tabel 2.1.

Pada tahun 2021 BKD Provsu telah mendapatkan alokasi anggaran pada APBD dan P-APBD, adapun anggaran dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi	%
		APBD	P-APBD		
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.082.505.200	20.497.876.387	19.592.307.687	95,58
A.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	207.346.000	69.020.000	59.856.000	86,72
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.377.571.000	16.739.614.405	16.191.478.088	96,73
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.755.131.000	16.378.774.405	15.854.638.088	96,80
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	622.440.000	360.840.000	336.840.000	93,35
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.780.000	-	-	-
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	34.780.000	-	-	-
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.918.400	1.778.447.712	1.584.931.596	89,12
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.527.500	756.284.712	597.867.950	79,05
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	247.434.000	330.959.750	325.167.535	98,25
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.384.900	147.493.250	144.059.725	97,67
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.750.000	37.750.000	37.750.000	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi	%	
		APBD	P-APBD			
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.822.000	505.960.000	480.086.386	94,89
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.057.862.700	1.537.462.270	1.465.508.790	95,32
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.594.500	19.594.500	2.697.940	13,77
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	77.780.680	64,82
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	783.268.200	1.219.867.770	1.213.030.170	99,44
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	135.000.000	178.000.000	172.000.000	96,63
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		275.027.100	373.332.000	290.533.213	77,82
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.678.600	68.678.000	52.648.499	76,66
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.398.500	268.704.000	213.905.214	79,61
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000	35.950.000	23.979.500	66,70
II. Program Kepegawaian Daerah			6.674.792.800	7.492.593.000	5.355.405.034	71,48
A.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		3.438.111.800	2.494.800.000	2.450.062.726	98,21
	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	166.401.000	165.893.000	161.463.300	97,33
	2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	926.750.000	150.074.000	147.686.426	98,41
	3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	63.101.000	62.583.000	60.746.900	97,07
	4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100
	5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	144.706.600	-	-	-
	6	Pengelolaan Data Kepegawaian	143.113.200	130.580.000	97.662.300	74,79
	7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	494.040.000	485.670.000	482.503.800	99,35
B	Mutasi dan Promosi		445.791.000	365.296.000	238.988.940	65,42
	1	Pengelolaan Mutasi dan ASN	131.820.000	131.700.000	41.127.000	31,23

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi	%
		APBD	P-APBD		
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	271.071.000	190.696.000	155.576.940	81,58
3	Pengelolaan Promosi ASN	42.900.000	42.900.000	42.285.000	98,57
C	Pengembangan Kompetensi ASN	2.205.426.000	4.049.531.000	2.121.069.106	52,38
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	79.000.000	-	-	-
1	Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	1.462.248.000	3.289.463.000	1.688.235.029	51,32
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	313.100.000	203.100.000	143.750.000	70,78
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	188.916.000	394.856.000	155.946.477	39,49
4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	162.162.000	162.112.000	133.137.600	82,13
D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	585.464.000	582.966.000	545.284.262	93,54
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	239.040.000	270.320.000	267.740.000	99,05
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100.798.000	36.660.000	25.320.000	69,07
3	Pembinaan Disiplin ASN	119.639.000	155.759.000	146.259.400	93,90
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	125.987.000	120.227.000	105.964.862	88,14
JUMLAH		26.757.298.000	27.990.469.387	24.947.712.721	89,13

Belanja ini pada Tahun Anggaran 2021 telah dipergunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam proses administrasi keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pertanggungjawaban keuangan. Dimana seluruh anggaran yang telah dipergunakan oleh BKD Provsu telah dipertanggungjawabkan kepada TAPD cq. BPKAD melalui laporan keuangan dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) TA. 2021.

Dari laporan tersebut dapat kami paparkan bahwa realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 24.947.712.721,- dengan persentase sebesar 89,13.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

3.1.1. Penerapan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS semakin memperjelas tentang tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Peraturan ini memperjelas bagaimana konsep PNS masa kini dan masa yang akan datang. Tentunya PP ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma PNS yang kurang baik di mata masyarakat.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 2 Manajemen PNS meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan Jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karir;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- l. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatur pula tentang masalah

pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

3.1.2. Manajemen Talenta Pegawai (*Talent Pool*)

Manajemen Talenta (*Talent pool*) adalah pengelolaan atas pegawai-pegawai yang dinilai bertalenta yang menunjukkan *superior performance* atau istimewa lain daripada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi pegawai lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku bagi pegawai lainnya sesuai nilai-nilai yang dianut oleh perangkat daerah. Guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk menduduki jabatan strategis, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dimotori oleh BKD sejak tahun 2021 telah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan menyelenggarakan *Talent Pool* Jabatan Administrator bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

Talent Pool dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan sistem merit di Provinsi Sumatera Utara sehingga didapatkan pejabat-pejabat yang diangkat merupakan PNS yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk tahun 2022 pelaksanaan *talent pool* ini direncanakan bukan hanya bagi para Pejabat yang telah menduduki jabatan akan tetapi PNS yang belum menduduki jabatan sama sekali akan tetapi berpotensi untuk diangkat pada jabatan tertentu karena telah memenuhi syarat administratif dan juga berkinerja baik. Dengan demikian BKD Provsu punya database PNS yang layak diangkat pada suatu jabatan administrasi karena telah memiliki hasil *talent pool* tersebut.

3.1.3. Penerapan Sistem Merit

Pemprovsu melalui BKD Provsu telah menerapkan sistem merit dalam promosi dan rotasi ASN dan jabatan. Tentu tidak mudah untuk menerapkannya karena banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Salah satu dasar pelaksanaan sistem merit adalah adanya dokumen Standar kompetensi jabatan yang mana sampai saat ini belum selesai disusun;
2. Pentingnya pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian. Untuk menyikapi hal tersebut, BKD senantiasa bekerjasama dengan Biro Organisasi untuk melakukan kembali penyusunan Anjab ABK bagi seluruh jabatan di Pemprovsu.
3. Perekrutan CPNS yang berorientasi talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diverifikasi tes) yaitu TKD & TKB, sistem komputerisasi.
4. Pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan melalui diklat yang diharapkan dapat diterapkan minimal 20 jam per tahun, diklat, *coaching* dan mentoring berbasis kinerja dengan bekerjasama dengan BPSDM Provsu.

5. Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping* dan penempatan pejabat sesuai standar jabatan.

Untuk mewujudkan isu tersebut, tentu butuh dukungan dari *stakeholder* Pemprovsu terutama dukungan dana yang ditampung dalam APBD BKD Provsu tahun 2023.

2.4. Review Terhadap RKPD

RKPD Provsu tahun 2023 yang diekspos Bappeda kepada seluruh OPD dilingkungan Pemprovsu merupakan gambaran arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD. BKD sendiri telah mereview RKPD tersebut dan tidak ada yang perlu dikoreksi lebih lanjut, hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk tahun 2023 terlebih setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana OPD tinggal melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Adapun review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Renja BKD pada Tabel 2.2.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 tidak mencantumkan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provsu yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak ada usulan yang disampaikan kepada BKD Provsu untuk ditampung pada Renja tahun 2023. Secara tupoksi BKD Provsu hanya bersinggung langsung kepada PNS yaitu berkaitan dengan penyelesaian administrasi kepegawaian seperti penyelesaian administrasi

kenaikan pangkat, gaji berkala, pengadaan, disiplin, pengembangan karir, promosi, mutasi dll.

Tabel T-C. 32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara**

OPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Provsu tahun 2023 telah dirumuskan berdasarkan Perubahan Renstra BKD Provsu tahun 2019-2023. Hal ini juga telah diupayakan seoptimal mungkin agar selaras dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan kepegawaian. Dimana telah dilakukan telaahan terhadap kebijakan dari beberapa kementerian yang selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD. Dari telaahan tersebut dapat kami simpulkan bahwa visi-misi kementerian dan Instansi Pusat yang bersinggungan dengan Tupoksi BKD Provsu adalah sebagai berikut :

3.1.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”.

Misi :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *Digital Bureaucracy*.

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

3.1.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Didalamnya disusun Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi Badan Kepegawaian Negara:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN.
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang

- baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
 3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
 4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
 5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK,

tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan di bawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas.
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI- ASN).
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima.
6. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Terdapat 3 (tiga) potensi yang dapat dioptimalkan menjadi kekuatan untuk dapat mewujudkan manajemen ASN yang baik, yaitu:

1. Mandat BKN yang kuat berdasarkan Undang-Undang;
2. Infrastruktur kelembagaan BKN yang memadai sehingga akan memudahkan penetrasi pelayanan kepegawaian;
3. Teknologi digital yang semakin canggih yang dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan kepegawaian.

Selain potensi-potensi tersebut, terdapat pula tantangan yang dihadapi BKN dalam menjalankan mandat selama ini:

1. Sistem Manajemen ASN.
2. Kompetensi, distribusi, dan pelayanan ASN.
3. Database dan sistem informasi ASN.
4. Penegakan tata kelola manajemen ASN

3.1.3. Telaahan Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara

Penyusunan Renstra Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024 tercantum dalam Peraturan Kepala KASN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024.

Visi “Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”.

Misi :

1. Mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN
2. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan akuntabel

Sasaran Strategi :

1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.
2. Meningkatnya kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Strategis (JPT).
3. Meningkatnya kualitas penerapan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta asas netralitas pegawai ASN.
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KASN.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Sumatera Utara, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BKD Provinsi Sumatera Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan BKD Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BKD
1.	Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas dan sejahtera serta terwujudnya instansi pemerintah yang professional dalam menerapkan Manajemen ASN.	Adanya dualisme regulasi antara Peraturan Kemenpan RB dan Peraturan BKN.
2.	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi dan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya sistem kepegawaian dengan Sistem Pusat dan Kab/Kota. 2. Database kepegawaian belum mutakhir.
3.	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara berada pada tahun 2020 Kategori B (61,05) dimana BKD sebagai penanggungjawab area perubahan manajemen SDM belum berkontribusi penuh terhadap pemenuhan aspek.
4.	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Sakip BKD Provinsi Sumatera Utara yang berada pada nilai 73,33 kategori BB (sangat baik).
5.	Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kompetensi pegawai masih berorientasi kepada pemenuhan peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya

		<p>mendukung kebutuhan organisasi.</p> <p>2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan.</p> <p>3. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>4. Meningkatnya jumlah perceraian PNS</p> <p>5. Belum adanya mekanisme seleksi masuk PNS ke Pemprov Sumatera Utara yang lebih mengedepankan kompetensi dan kualifikasi</p> <p>6. Pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan</p>
6.	Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.	Kondisi Sistem Merit Pemprov Sumatera Utara tahun 2021 berada pada Kategori Baik (263,5) .

3.1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2029 maka dapat kami simpulkan bahwa tidak ada hal yang spesifik dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak ada yang perlu ditelaah berkaitan dengan RTRW tersebut.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu strategis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara:

1. Belum optimalnya Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Perencanaan Kebutuhan ASN belum optimal, belum mengakomodir pada kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.
3. Sistem Penilaian Kinerja belum objektif.
4. Sistem Kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja.
5. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.
6. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai dan tingkat budaya kerja Aparatur, sehingga berpengaruh pada kinerja aparatur dan layanan publik.

3.3. Telaahan *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang diterbitkan pada September 2015. SDGs merupakan wujud komitmen seluruh negara- negara untuk melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan tujuan SDGs tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah tidak secara langsung bersinggungan, hal ini dikarenakan tugas pokok BKD adalah bersifat administratif. Akan tetapi BKD Provsu tetap dapat berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok tersebut yaitu dengan menciptakan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan penerapan sistem merit. Dengan terciptanya meritokrasi, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga berdampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.4. Telaahan terkait Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional, sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan penganggaran program kegiatannya telah responsif gender.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai wujud kesediaan BKD untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggarannya dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (pelaksanaan forum OPD Badan Kepegawaian Daerah Provsu).

Pelaksanaan forum OPD merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan dengan mitra kerja BKD Provinsi Sumatera Utara baik dari OPD Provinsi dan BKD/BKPSDM Kab/Kota. Melalui mekanisme ini diharapkan perencanaan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan, yang disinkronkan dengan kebijakan, program ataupun kegiatan baik vertikal maupun horisontal.

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.5.1. Tujuan

Dalam penyusunan Rencana kerja ini Badan Kepegawaian Daerah Provsu merumuskan tujuan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara. Dimana misi tersebut adalah **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”**. Dari visi ini, dijabarkan kedalam 5 (lima) misi, yang mana BKD berperan pada misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, *tata kelola pemerintahan yang baik*, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan prioritas pembangunan Sumatera Utara 2019-2023 sebanyak 8 prioritas antara lain :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
4. Peningkatan layanan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
5. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
6. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
7. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata; dan

8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari 8 (delapan) arah pembangunan tersebut, BKD berperan pada prioritas pembangunan ke-8, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi ini bersifat komposit (terdiri dari beberapa OPD) yang mana area reformasi birokrasi itu sendiri terdiri dari 8 area perubahan dan BKD Provsu berperan hanya pada 1 (satu) area yaitu pelaksanaan **sistem merit**. Berkaitan dengan dukungan pencapaian visi-misi Gubernur serta prioritas pembangunan Sumatera Utara yang ke-8, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan penyusunan Renja tahun 2023 adalah yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Sejalan dengan tujuan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyusun langkah-langkah pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan melakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023. Indikator Kinerja ini telah dikonsultasikan kepada Bappeda Provsu untuk dimasukkan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Revisi indikator BKD Provsu tersebut juga mendapatkan dukungan dari Bappeda karena dari analisis akan dapat mendukung peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun revisi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provsu tahun 2021-2023

No	IKU	Target			Realisasi	
		2021	2022	2023	2021	2022
1	Nilai Sistem Merit	250	300	325	263,5	Penilaian akhir tahun

Keterangan nilai:

Nilai	Kategori
< 174	Buruk
175 - 249	Cukup
250 - 324	Baik
325 - 400	Sangat Baik

Formulasi Perhitungan Nilai

Dalam hal formulasi perhitungan nilai sistem merit, prosesnya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada 8 aspek yang akan dinilai, yaitu :

No	ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan	20%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir dan Mutasi	25%
4	Rotasi dan Promosi	10%
5	Manajemen Kinerja	15%
6	Penggajian, Penghargaan	10%
7	Disiplin	5%
8	Pelayanan Sistem Informasi	5%

Untuk mendapatkan nilai sistem merit, BKD Provsu hanya menyediakan dokumen pendukung sesuai dengan aspek yang dinilai yang diupload pada aplikasi. Seluruh dokumen yang diupload akan diverifikasi oleh tim KASN sebagai bahan pemberian nilai sistem merit.

A. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas BKD Provsu juga telah menyusun sasaran pada Perubahan Renstra BKD Provsu tahun 2019-2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja yaitu :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
3. Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian;
4. Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN.

3.6. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan butir 55 pasal 1 Bab 1 Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada butir 56 dijelaskan bahwa Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Provsu serta upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

II. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN;
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN;
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN;
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - Evaluasi Pemberhentian ASN;

- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pengelolaan Data Kepegawaian;
 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
- Pengelolaan Mutasi ASN;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - Pengelolaan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - Pengelolaan Assessment Center;
 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat;
 - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN;
 - Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional;
 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - Pembinaan Disiplin ASN;
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.;

Dari program dan kegiatan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan program/kegiatan prioritas untuk tahun 2023, yaitu :

Program/Kegiatan Prioritas

1. Program Kepegawaian Daerah

- Evaluasi pengadaan dan pengadaan ASN;
- Perumusan bahan kebijakan peberhentian ASN;
- Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian;
- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- Pengelolaan Promosi ASN;
- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
- Pengelolaan Assessment Center;
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;
- Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
- Pembinaan Disiplin ASN.

Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi pendanaan BKD Provsu tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Renja ini (Tabel 3.1).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKD PROVSU

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan mempedomani rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dan Perubahan Renstra BKD Provsu Tahun 2019-2023. Rencana kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 dan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan pada dokumen perencanaan selanjutnya yaitu RKA dan DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

Penyusunan Renja BKD Provsu tahun 2023 telah diupayakan disusun sesuai dengan prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Provsu. Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, sasaran serta proyeksi pagu pendanaan telah disusun dalam Tabel 3.2 yang terdapat dalam lampiran Renja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan BKD Provsu untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dan Perubahan Renstra BKD Provsu tahun 2019-2023. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan proyeksi pagu pendanaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja yang disusun, selain menjadi dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol dalam peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2023 hal ini ditandai dengan adanya indikator kinerja yang disertai dengan target capaian kinerja serta pendanaan sehingga diperlukan konsistensi dan tanggung jawab dari bidang yang akan melaksanakan program dan kegiatan. Untuk menjamin konsistensi dan tanggung jawab tersebut, Internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara akan menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang antara Jabatan Fungsional Umum (JFU) dengan Pengawas, Pengawas dengan Administrator, Administrator dengan Kepala BKD dan Kepala BKD dengan Gubernur Sumatera Utara dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan agar seluruh PNS dilingkungan BKD Provsu memahami peraturan terkait dengan pelaksanaan rencana kerja serta tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. Renja dilaksanakan dengan semua potensi dan penuh tanggung jawab serta diarahkan oleh Kepala BKD Provsu dalam penyelenggaraan program/kegiatan;
3. Seluruh Pejabat di lingkungan BKD Provsu agar bertanggung jawab pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja;
4. Seluruh pejabat di lingkungan BKD Provsu agar segera menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) program kegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Prorgam/kegiatan yang telah disusun dalam Renja agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebab akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja oleh Bappeda Provsu secara triwulanan.

Sejalan dengan disusunnya Rencana kerja ini, BKD Provsu juga akan menyusun dokumen perencanaanya selanjutnya yaitu RKA dan DPA yang disertai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagai dasar secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Medan,

2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740202 199303 1 007

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S.D. TAHUN 2020
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD s/d Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Wajib/Pemerintahan Umum									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN BKD Provsu	28 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya tambahan penghasilan PNS BKD Provsu	28 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	BELANJA LANGSUNG									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	%	%	-	- %	- %	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang didistribusikan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127 Kali	30 bulan	64 Kali	64 Kali	100%	- Kali	- Kali	-
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	434 Kali	214 bulan	217 Kali	216 Kali	100%	- Kali	- Kali	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	63.000 lembar	30.000 bulan	33.000 lembar	33.000 lembar	100%	- lembar	- lembar	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keluangan	Terlaksananya penyusunan administrasi perkantoran/keuangan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Komunikasi, sumber daya air	Terpenuhinya jasa administrasi Komunikasi, sumber daya air	3 bulan	- bulan	3 bulan	3 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur	%	%	%	%	-	- %	- %	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat	64 unit	32 bulan	32 unit	32 unit	100%	- unit	- unit	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor BKD	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BKD Provsu	Tersedianya gedung kantor BKD untuk sementara	24 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	%	%	%	-	- %	- %	-
	Memfasilitasi Penyelesaian Pensiun PNS Gol./Ruang IV/c Keatas ke BKN dan Sekretariat Kabinet RI di Jakarta	SK pensiun dapat diterima tepat waktu	280 SK	141 bulan	140 SK	140 SK	100%	- SK	- SK	-

Peningkatan Administrasi PNS yang akan memasuki pensiun dilingkungan Pemprov	Jumlah SK PNS yang memasuki pensiun yang diterbitkan	1.400 SK	2.046 bulan	- SK	- SK	-	- SK	- SK	-
Pembuatan Listing PNS yang mencapai batas usia pensiun dilingkungan Pemprov	Jumlah listing PNS yang memasuki pensiun yang disusun	1.220 SK	1.120 bulan	- SK	- SK	-	- SK	- SK	-
Monitoring Perpindahan Tugas PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota	SK perpindahan PNS diproses sesuai ketentuan dan tepat waktu	2.000 SK	- bulan	1.000 SK	1.000 SK	100%	- SK	- SK	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan	%	%	%	%	-	- %	- %	-
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Daerah Provsu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dok	4 bulan	4 Dok	4 Dok	100%	- Dok	- Dok	-
Monitoring wajib lapor LHKPN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya monitong wajib lapor LHKPN di Lingkungan Provsu	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Laporan Mutasi Pegawai ke BKN dan Depdagri di Jakarta		12 bulan	12 bulan	- bulan	- bulan	-	- bulan	- bulan	-
Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		bulan			-	-	-	-
Bantuan PNS Tugas Belajar Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas Belajar No. 29 Tahun 2012	Jumlah PNS Tugas Belajar	30 PNS	6 bulan	15 PNS	8 PNS	53%	- PNS	- PNS	-
Fasilitasi seleksi dan Pembinaan Pendidikan Ikatan Dinas (IPDN dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat)	Terlaksananya Pembinaan terhadap Praja IPDN	320 PNS	102 bulan	120 PNS	62 PNS	52%	- PNS	- PNS	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Lingkungan Pemprov	%	%	%	%	-	- %	- %	-
Pembinaan mental kuliah agama ASN Di Lingkungan Pemprov	Terlaksananya Kuliah Agama di Lingkungan Sekretariat kantor Gubenur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Pelaksanaan pengakhiran Tugas Belajar dan Izin Belajar	Terbitnya surat penetapan/pengakhiran izin belajar bagi PNS	70 PNS	40 bulan	20 PNS	17 PNS	85%	- PNS	- PNS	-
Pengambilan sumpah/janji PNS	Jumlah PNS / CPNS yang diambil sumpahnya	900 PNS	500 bulan	400 PNS	300 PNS	75%	- PNS	- PNS	-
Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi Kepegawaian dan Percepatan E-Government BKD Provsu	Lancarnya pengolahan data PNS	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Pemutakhiran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pem. Kab/Kota se Sumatera Utara	Terlaksananya pemutakhiran data PNS	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Monitoring manajemen kepegawaian tentang pengisian SIMPEG di Lingkungan Pem. Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya monitoring manajemen kepegawaian tentang pengisian SIMPEG di lingkungan Provsu	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Rapat tim pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian PNS dilingkungan Pemprov	Terlaksananya rapat izin perkawinan dan perceraian PNS Provsu	8 Kali	2 bulan	4 Kali	6 Kali	150%	- Kali	- Kali	-
Rapat tim pembantu penilai pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilingkungan Pemprov	Terlaksananya rapat tim pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Provsu	8 Kali	4 bulan	4 Kali	6 Kali	150%	- Kali	- Kali	-
Pelaksanaan Investigatif Disiplin PNS di Lingkungan Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan UPT yang berada pada Kabupaten Kota se Sumatera Utara	Terlaksananya investigasi disiplin PNS	266 UPT	107 bulan	133 UPT	133 UPT	100%	- UPT	- UPT	-
Pelaksanaan seleksi, promosi, rotasi JPT Pratama, Administrasi dan Pengawas di Lingk. Pemprov	Terlaksananya seleksi, promosi dan rotasi JPT Administrasi dan Pengawas di lingkungan Provsu	380 PNS	96 bulan	180 PNS	171 PNS	95%	- PNS	- PNS	-
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Pelaksanaan penilai tim penganugerahan Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi PNS dilingkungan Pemprov dan Pemkab/kota se-Sumut)	Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan Satyalencana Karya Satya	6.775 PNS	1.400 bulan	3.275 PNS	2.876 PNS	88%	- PNS	- PNS	-

Memfasilitasi PNS ke BKN Pusat dan Sekretariat Negara dalam rangka penyelesaian usul kenaikan pangkat Pemprov dan Pemkab/Pemko se-Sumut unt Periode April dan Oktober untuk Gol. IV/c ke atas	SK Kenaikan pangkat selesai tepat waktu	300 PNS	262 bulan	100 PNS	100 PNS	100%	- PNS	- PNS	-
Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS secara terpadu oleh Tim Provinsi dan Kab/Kota untuk periode April dan Oktober	Terlaksananya administrasi kenaikan pangkat PNS sesuai dengan jadwal	31.000 PNS	12.000 bulan	19.000 PNS	18.754 PNS	99%	- PNS	- PNS	-
Memfasilitasi PNS dari Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan dalam rangka Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara	SK kenaikan pangkat selesai sebelum waktu kenaikan pangkat	32 PNS	16 bulan	16 PNS	16 PNS	100%	- PNS	- PNS	-
Memfasilitasi PNS mengikuti Diklat dan Program Pengembangan Lainnya	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan pengembangan lainnya	120 PNS	15 bulan	100 PNS	43 PNS	43%	- PNS	- PNS	-
Pelaksanaan Penerimaan Calon PNS Formasi TA. 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah CPNS yang diterima	2 Kali	1 bulan	1 Kali	1 Kali	100%	- Kali	- Kali	-
Sosialisasi E-Formasi	Terlaksananya sosialisasi e-formasi di lingkungan OPD	1 Kali	- bulan	1 Kali	1 Kali	100%	- Kali	- Kali	-
Pengembangan Sistem E-SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019	Terlaksananya pengembangan aplikasi E-SDM	24 bulan	5 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	- bulan	- bulan	-
Penyusunan penganggaran responsif gender di lingkungan BKD Provsu dan Kab/Kota se Sumut	Terlaksananya kegiatan penyusunan penganggaran responsif gender di lingkungan BKD Provsu	33 Kab/Kota	33 bulan	- Kab/Kota	- Kab/Kota	-	- Kab/Kota	- Kab/Kota	-
Crosscek (Penelitian) terhadap legalitas ijazah pejabat/PNS Gol. III/a keatas yang berlatarbelakang Sarjana Muda dan Sarjana	Jumlah ijazah pejabat/PNS Gol. III/a keatas yang berlatarbelakang Sarjana Muda dan Sarjana yang dicrosscek keabsahannya	200 Org	60 bulan	- Org	- Org	-	- Org	- Org	-
Sosialisasi tentang Peraturan-Peraturan Kediklatan, Peningkatan Kualitas SDM dan LHKPN	Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan-peraturan kediklatan di lingkungan Pemrov	2 Kali	4 bulan	- Kali	- Kali	-	- Kali	- Kali	-
Tallent Mapping bagi PNS di lingkungan Pemprov	Jumlah PNS yang mengikuti Tallend Mapping	200 PNS	450 bulan	- PNS	- PNS	-	- PNS	- PNS	-
Pengembangan Simpeg/Pelayanan Administrasi Kepegawaian tanpa Kertas (Paket Keras)	Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMPEG	4 Aplikasi	3 bulan	- Aplikasi	- Aplikasi	-	- Aplikasi	- Aplikasi	-
Pembuatan Buku Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemprov	Jumlah biodata PNS yang diterbitkan dan disusun ke dalam DUK	16.400 Org	16.100 bulan	- Org	- Org	-	- Org	- Org	-
Pemutakhiran PNS di lingkungan Pemprov dan Kab/Kota se Sumut	Jumlah PNS yang dilakukan pemutakhiran data nya	175.000 PNS	90.003 bulan	- PNS	- PNS	-	- PNS	- PNS	-
Pembekalan Keterampilan terhadap PNS di Lingkungan Pemprov yang memasuki BUP	Jumlah PNS yang akan memasuki BUP dilakukan pembekalan keterampilan	121 PNS	121 bulan	- PNS	- PNS	-	- PNS	- PNS	-
Pengawasan Manajemen Kepegawaian tentang Pengisian Simpeg di Lingkungan Pemprov	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengisian biodata pada SIMPEG	28.140 PNS	9.300 bulan	- PNS	- PNS	-	- PNS	- PNS	-
Pemeliharaan/Perawatan Arsip PNS Pemprov dan Pemkab/Kota se Sumut dan Memfasilitasi PNS ke BKN Medan dan Jakarta untuk Menyelesaikan Pengurusan Karpeg/Karis/Karsu dan Permasalahan Konversi NIP Baru	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan arsip PNS Pemprov dan PNS Pemkab/Pemko se Sumut	85.775 Org	1.096 Org	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian Listing Kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober 2019 di Lingkungan Pemprov	Jumlah listing PNS yang akan naik pangkat yang disusun	1.100 Org	1.113 Org	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kinerja PNS ke Pemkab/Pemkot se Sumut	Terlaksananya pembinaan kinerja PNS Pemprov dan Pemkab/Pemko se-Sumut	33 Kab/Kota	3 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dalam rangka Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov	Pembinaan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemprov	33 Kab/Kota	15 Kab/Kota	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	- Unit	- Unit	2 Unit	2 Unit	100%	12 bln	12 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	- unit	- unit	26 unit	26 unit	100%	28 unit	54 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala	- bln	- bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	
	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian								
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN								
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Kebutuhan dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	- OPD	- OPD	49 OPD	49 OPD	100%	49 OPD	98 unit	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	- Kali	- Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Lap	2 Lap	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		- SK	- SK	1.131 SK	1.167 SK	103%	1.167 SK	2.334 SK	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	- bln	- bln	12 bln	12 Bln	100%	1 Lembaga	13 unit	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang	- bln	- bln	12 bln	0 0	0%		0	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	- OPD	- OPD	49 OPD	49 OPD	100%	10.000 ASN	10.049 unit	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	- Aflikasi	- Aflikasi	5 Aflikasi	5 Aplikasi	100%	5 Aplikasi	10 Aplikasi	
	Mutasi dan Promosi	Terlaksananya proses mutasi dan promosi			17.650 SK	17.973 SK	102%	10.630 SK	28.603 SK	
	Pengelolaan Mutasi dan ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat	- SK	- SK	900 SK	609 SK	68%	2.500 SK	3.109 SK	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang	- SK	- SK	16.000 SK	16.649 SK	104%	7.230 SK	23.879 SK	
	Pengelolaan Prmosi ASN	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan	- SK	- SK	750 SK	715 SK	95%	900 SK	1.615 SK	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN								
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	- TA	- TA	1 TA	0 0	0%	2.532 ASN	2.532 ASN	
	Pengelolaan Assesment Center	Terlaksananya Proses Sistem Merit	- PNS	- PNS	550 PNS	545 PNS	99%	3.648 ASN	4.193 ASN	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	- PNS	- PNS	650 PNS	644 PNS	99%	140 ASN	784 ASN	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	- Keg	- Keg	3 Keg	3 Keg	100%	200 ASN	203 ASN	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	- SK	- SK	1.950 SK	1.939 SK	99%	-	1.939 SK	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikat Jabatan Fungsional	Tersedianya SOP tentang Jabatan Fungsional	- Dok	- Dok	- Dok	- Dok	0%	1 Dok	1 SK	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terdapatnya Pemahaman serta Informasi tentang Uji Kompetensi dan Diklat Jabatan Fungsional	- Instansi	- Instansi	- Instansi	- Instansi	0%	6 Instansi	6 Instansi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	- ASN	- ASN	- ASN	- ASN	0%	3.950 ASN	3.950 ASN	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang Dibina	- ASN	- ASN	- ASN	- ASN	0%	3.950 ASN	3.950 SK	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN								
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur Pemprov yang dinilai Kinerjanya	- PNS	- PNS	25.000 PNS	25.000 PNS	100%	25.000 ASN	50.000 ASN	
	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	- PNS	- PNS	1.850 PNS	873 PNS	47%	2.500 ASN	3.373 ASN	
	Pembinaan Disiplin ASN	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	- PNS	- PNS	35 PNS	33 PNS	94%	49 OPD	82 OPD	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	- Dok	- Dok	1 Dok	1 Dok	100%	49 OPD	50 OPD	

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU TAHUN 2022

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	p	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4		5	6	7		8	8	10
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	80	90	-	82,69	82,69	98,65	-	-	-
2	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	90	90	95	-	99,6	99,6	101,40	-	-	-
3	Nilai Sistem Merit	-	-	250	300	-	-	263,5	-	325	-

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
	Urusan Wajib/Pemerintahan Umum					Urusan Wajib/Pemerintahan Umum					
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	25.774.247.500	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	25.774.247.500	
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	14 Dok	485.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	14 Dok	485.000.000	
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dok	485.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14 Dok	485.000.000	
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya dokumen administrasi keuangan BKD Provsu	157 PNS	18.291.882.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya dokumen administrasi keuangan BKD Provsu	157 PNS	18.291.882.300	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah PNS BKD Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	125 PNS	17.882.292.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Medan	Jumlah PNS BKD Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	125 PNS	17.882.292.300	
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Medan	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	12 PNS	81.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Medan	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	12 PNS	81.000.000	
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	20 PNS	328.590.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Medan	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	20 PNS	328.590.000	
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	514.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	514.400.000	
5 03 01 1.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan PNS BKD Provsu	252 Stel	229.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan PNS BKD Provsu	252 Stel	229.400.000	
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340 PNS	285.000.000	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum BKD Provsu	100 %	3.506.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum BKD Provsu	100 %	3.506.200.000	
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan		800.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan		800.000.000	
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	12 Bulan	400.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	12 Bulan	400.000.000	
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BKD	12 Bulan	198.500.000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Medan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BKD	12 Bulan	198.500.000	
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan BKD Provsu	12 Bulan	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Medan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan BKD Provsu	12 Bulan	42.000.000	
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	1.466.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	1.466.500.000	
5 03 01 1.07	Penyediaan Pakaian Dinas	Medan	Jumlah Pakaian Dinas PNS BKD yang Disiapkan	520 Stel	599.200.000	Penyediaan Pakaian Dinas	Medan	Jumlah Pakaian Dinas PNS BKD yang Disiapkan	520 Stel	599.200.000	
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100 %	2.191.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu	100 %	2.191.000.000	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	440 Surat	22.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	440 Surat	22.000.000	
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	1 Tahun	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Medan	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	1 Tahun	200.000.000	
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	1 Tahun	1.600.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Medan	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	1 Tahun	1.600.000.000	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	8 Orang	369.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	8 Orang	369.000.000	
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya proses pemeliharaan aset BKD	100 %	785.765.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya proses pemeliharaan aset BKD	100 %	785.765.200	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	498.573.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	498.573.400	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	30 Unit	222.691.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	30 Unit	222.691.800	
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	12 Bln	64.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Medan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	12 Bln	64.500.000	
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	470.600.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	517.660.000	
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	14.455.152.500	Program Kepegawaian Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	14.455.152.500	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN	100 %	7.259.792.500	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian ASN	100 %	7.259.792.500	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dok	55.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dok	55.000.000	
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sumut	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	1.000 Formasi ASN	185.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Sumut	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	1.000 Formasi ASN	185.000.000	
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.000 P3K	1.500.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.000 P3K	1.500.000.000	
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	1.200 SK	150.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	1.200 SK	150.000.000	
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut sosialisasi/bembekalan	1.200 SK	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indonesia	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut sosialisasi/bembekalan	1.200 SK	150.000.000	
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	4.200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Medan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	4.200.000.000	
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	98 Dok	19.440.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	98 Dok	19.440.000	
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan, Kab/Kota	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	100.000 PNS	302.084.500	Pengelolaan Data Kepegawaian	Medan, Kab/Kota	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	100.000 PNS	302.084.500	
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	698.268.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Medan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	698.268.000	
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN	100 %	2.346.236.000	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya proses mutasi dan promosi ASN	100 %	2.346.236.000	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab/Kota	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	500 SK	100.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab/Kota	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	500 SK	100.000.000	
03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	10.000 SK	314.236.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Medan	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	10.000 SK	314.236.000	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Sumut	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemrov	1.800 ASN	1.932.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Sumut	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemrov	1.800 ASN	1.932.000.000	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN	100 %	3.272.155.100	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN	100 %	3.272.155.100	
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150 PNS	297.009.700	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150 PNS	297.009.700	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Terlaksananya Proses Sistem Merit	8 Aspek	500.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Medan	Terlaksananya Proses Sistem Merit	8 Aspek	500.000.000	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indonesia	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	90 PNS	904.905.400	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indonesia	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	90 PNS	904.905.400	
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	14 PNS	350.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Medan	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	14 PNS	350.000.000	
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	1 Dok	20.240.000	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	1 Dok	20.240.000	
5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40 PNS	200.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40 PNS	200.000.000	
5 03 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jakarta	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	10 Instansi Pembina	200.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jakarta	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	10 Instansi Pembina	200.000.000	
5 03 02 1.03 11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Medan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	48 OPD	100.000.000	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Medan	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	48 OPD	100.000.000	
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Kali	150.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Kali	150.000.000	
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	4.000 ASN	550.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Provsu	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	4.000 ASN	550.000.000	
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan		Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100 %	1.576.968.900	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan		Terlaksananya proses penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100 %	1.576.968.900	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sumut	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	25.000 PNS	280.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sumut	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	25.000 PNS	280.000.000	
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sumut	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	2.649 PNS	500.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sumut	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	2.649 PNS	500.000.000	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sumut	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	33 Kab/Kota	535.223.193	Pembinaan Disiplin ASN	Sumut	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	33 Kab/Kota	535.223.193	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Sumut	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	49 OPD	261.745.707	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Sumut	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	49 OPD	261.745.707	
	JUMLAH				40.229.400.000	JUMLAH				40.229.400.000	

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
Usuran Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian					40.000.000.000				44.000.000.000							
5	03	01							100	%	25.544.847.500			100	%	28.099.332.250
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BKD yang disusun	Medan	14	Dok	485.000.000	APBD		14	Dok	533.500.000	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Medan	14	Dok	485.000.000	APBD		14	Dok	533.500.000	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan		157	PNS	18.291.882.300	APBD		157	PNS	20.121.070.530	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKD Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	Medan	125	PNS	17.882.292.300	APBD		125	PNS	19.670.521.530	
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	Medan	12	PNS	81.000.000	APBD		12	PNS	89.100.000	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	Medan	20	PNS	328.590.000	APBD		20	PNS	361.449.000	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN BKD yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur		340	PNS	514.400.000	APBD		340	PNS	565.840.000	
5	03	01	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan PNS BKD Provsu	Medan	252	Stel	229.400.000	APBD		300	Stel	270.000.000	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Medan	340	PNS	285.000.000	APBD		340	PNS	313.500.000	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum BKD Provsu		100	%	3.506.200.000	APBD		100	%	3.856.820.000	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	Medan			800.000.000	APBD				880.000.000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	Medan	12	Bulan	400.000.000	APBD		12	Bulan	440.000.000	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan BKD	Medan	12	Bulan	198.500.000	APBD		12	Bulan	218.350.000	
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan BKD Provsu	Medan	12	Bulan	42.000.000	APBD		12	Bulan	46.200.000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan Dalam Daerah	Medan	12	Bulan	1.466.500.000	APBD		12	Bulan	1.613.150.000	
5	03	01	1.07		Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas PNS BKD yang Disiapkan	Medan	520	Stel	599.200.000	APBD		520	Stel	659.120.000	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian BKD Provsu		100	%	1.491.000.000	APBD		100	%	1.640.100.000	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD Provsu Ke Luar Daerah	Medan	440	Surat	22.000.000	APBD		440	Surat	24.200.000	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor BKD Provsu	Medan	1	Tahun	200.000.000	APBD		1	Tahun	220.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Sementara BKD	Medan	1 Tahun	900.000.000	APBD		1 Tahun	990.000.000	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan	Medan	8 Orang	369.000.000	APBD		8 Orang	405.900.000	
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan aset BKD Provsu		100 %	1.256.365.200	APBD		100 %	1.382.001.720	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Medan	2 Unit	498.573.400	APBD		2 Unit	548.430.740	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	Medan	30 Unit	222.691.800	APBD		30 Unit	244.960.980	
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor BKD Provsu	Medan	12 Bln	64.500.000	APBD		12 Bln	70.950.000	
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	1 Unit	470.600.000	APBD		1 Unit	517.660.000	
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian		100 %	14.455.152.500	APBD		100 %	15.900.667.750	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100 %	7.259.792.500	APBD		100 %	7.985.771.750	
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	Provsu	3 Dok	55.000.000	APBD		3 Dok	60.500.000	
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaana Pengadaan ASN	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	Sumut	1.000 Formasi ASN	185.000.000	APBD		1.000 Formasi ASN	203.500.000	
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	Indonesia	1.000 P3K	1.500.000.000	APBD		700 P3K	1.650.000.000	
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan	Indonesia	1.200 SK	150.000.000	APBD		1.200 SK	165.000.000	
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut sosialisasi/pembekalan	Indonesia	1.200 SK	150.000.000	APBD		1.200 SK	165.000.000	
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Medan	1 Lembaga	4.200.000.000	APBD		1 Lembaga	4.620.000.000	
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	Medan	98 Dok	19.440.000	APBD		98 Dok	21.384.000	
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN Pemprovsu dan Kab/Kota yang diolah	Medan, Kab/Kota	100.000 PNS	302.084.500	APBD		100.000 PNS	332.292.950	
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Medan	5 Aplikasi	698.268.000	APBD		5 Aplikasi	768.094.800	
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN		100 %	2.346.236.000	APBD		100 %	2.580.859.600	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kab/Kota	500 SK	100.000.000	APBD		500 SK	110.000.000	
03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	Medan	10.000 SK	314.236.000	APBD		10.000 SK	345.659.600	
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemprovsu	Sumut	1.800 ASN	1.932.000.000	APBD		300 Jabatan	2.125.200.000	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN		100 %	3.272.155.100	APBD		100 %	3.599.370.610	
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	Medan	150 PNS	297.009.700	APBD		150 PNS	326.710.670	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Proses Sistem Merit	Medan	8 Aspek	500.000.000	APBD		8 Aspek	550.000.000	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	Indonesia	90 PNS	904.905.400	APBD		90 PNS	995.395.940	
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	Medan	14 PNS	350.000.000	APBD		25 PNS	385.000.000	
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	Medan	1 Dok	20.240.000	APBD		1 Dok	22.264.000	
5 03 02 1.03 09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Indonesia	40 PNS	200.000.000	APBD		40 PNS	220.000.000	
5 03 02 1.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	Jakarta	10 Instansi Pembina	200.000.000	APBD		10 Instansi Pembina	220.000.000	
5 03 02 1.03 11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Medan	48 OPD	100.000.000	APBD		48 OPD	110.000.000	
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	Provsu	1 Kali	150.000.000	APBD		1 Kali	165.000.000	
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	Provsu	4.000 ASN	550.000.000	APBD		4.000 ASN	605.000.000	
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Terlaksananya penilaian dan evalusi kinerja ASN		100 %	1.576.968.900	APBD		100 %	1.734.665.790	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	Sumut	25.000 PNS	280.000.000	APBD		25.000 PNS	308.000.000	
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Sumut	2.649 PNS	500.000.000	APBD		2.649 PNS	550.000.000	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	Sumut	33 Kab/Kota	535.223.193	APBD		33 Kab/Kota	588.745.512	
				49 OPD		APBD		49 OPD	-	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	Sumut	33 Kab/Kota	261.745.707	APBD		33 Kab/Kota	287.920.278	
				49 OPD		APBD		49 OPD	-	
JUMLAH					40.000.000.000			44.000.000.000		

UPAYA PENCAPAIAN TERHADAP TARGET IKU OPD TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA OPD	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAGU ANGGARAN				RENCANA AKSI DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	
1	Nilai Sistem Merit	325 Point	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	447,694,000	1000 P3K
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	479,562,400	5 Aplikasi
				Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	2,013,772,450	900 ASN
				Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	283,626,000	1 Kegiatan, dengan beberapa jumlah
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	369,158,000	140 ASN
					Pembinaan Jabatan Fungsional	149,370,000	3.950 ASN
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	255,328,000	25.000 ASN
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	18,926,200	2.500 ASN
					Pembinaan Disiplin ASN	33,249,450	49 OPD